TUGAS FILSAFAT PANCASILA

**KASUS PENYUAPAN PENGATURAN PROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN TEORI SOEKARNO**

Dosen pengampuh:

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S.,M.Hum.

Disusun oleh:

Bellamita Evi Dyah Ardianti

NIM. 3903019012

FAKULTAS BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KAMPUS MADIUN

2019

Abstrak

Penyuapan merupakan salah satu jenis korupsi. Penyuapan adalah tindakan memberikan suap yang berupa uang maupun barang kepada penerima suap untuk mendapatkan apa yang di minati oleh penyuap/sebagai imbal jasa untuk mendapatkan posisi, jabatan/kedudukan dalam pemerintah, perusahaan maupun menghilangkan jejak kasus dalam memenangkan perkara.

Penyuapan sering kali terjadi untuk memudahkan seseorang (pelaku penyuapan) dalam mendapatkan sesuatu yang penyuap itu inginkan. Misalnya dalam kasus penyuapan proyek-proyek pemberian dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Penerima suapbeberapa kali menerima uang suap dari rekanan penggarap proyek. Yang seharusnya uang dari proyek digunakan untuk pembangunan proyek-proyek tersebut tetapi malah dibagikan pada para penggarap proyek.

Studi kasus

Penyidik KPK memeriksa 2 saksi terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019 pada hari Kamis, 28 November 2019. Penyidik memeriksa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozak Muslim, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo. Dua saksi tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka Supendi, bupati Indramayu nonaktif.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SP (Supendi),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (28/11/2019). Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Indramayu, Jawa Barat Supendi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan kekuasaannya.

Selain Supendi, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kabid Jalan di Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono, serta satu pihak swasta Carsa AS. Supendi diduga sering meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku rekanan penggarap proyek.

Supendi diduga sudah mulai meminta uang kepada Carsa sejak Mei 2019 sejumlah Rp100 juta. Tak hanya Supendi, Omarsyah dan Wempy Triyono juga beberapa kali menerima uang dari Carsa. Pemberian uang ke Bupati Supendi serta dua pejabatnya disinyalir terkait dengan pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Pengertian Penyuapan

Penyuapan adalah tindakan memberikan suap yang berupa uang maupun barang kepada penerima suap untuk mendapatkan apa yang di minati oleh penyuap/sebagai imbal jasa untuk mendapatkan posisi, jabatan/kedudukan dalam pemerintah, perusahaan maupun menghilangkan jejak kasus dalam memenangkan perkara.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif (pihak yang

memberikan atau menjanjikan sesuatu) dan penyuapan pasif (pihak penerima suap), ada 3 unsur esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya(Wahyudi, 2011).

Ad'a 3 unsur yang esensial dari pelaku suap-menyuap yaitu:

- Menerima hadiah atau janji;
- Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP

Menimbang:

- a. bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa perbuatan dimaksud dalam sub a, belum ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang tersendiri;

Mengingat:

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1);
2. ketetapan majelis MPR nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (ekaprasetia pancasila);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran negara tahun 1958

nomor 127, tambahan lembaran negara nomor 1660), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1976 (lembaran negara tahun 1976 nomor 26, tambahan lembaran negara nomor 3080)

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan p-eraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5(lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lim belas juta)

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta)

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (27-10-1980)

Walaupun UU ini masih berlaku, tetapi belum ada satupun pelaku suap-menyuap yang terjerat oleh pasal ini. Terdapat UU lainnya tentang suap yaitu UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diatur pula dalam UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor)

Jenis-jenis penyuapan:

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Penyuapan aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subyek hukum mengetahui tujuan terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Penyuapan pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang.

Pencegahan tindak pidana suap:

- Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggara negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Mengikutsertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan.

Kaitan penyuapan dengan demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik. Demokrasi yang menggariskan pemerintahan oleh rakyat dapat menjadi baik apabila mendasarkan kewibawaan sistem pemerintahannya pada *law* (hukum). Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia.

Penyalahgunaan demokrasi dapat berasal dari para pemegang kekuasaan yang menyuap beberapa pihak untuk mempertahankan jabatannya atau mungkin untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi, bahkan yang masih menyandang gelar calon wakil rakyat yang nantinya akan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi apakah mereka akan memperjuangkan kepentingan rakyat?

Dilihat dari kenyataan bahwa para calon wakil rakyat berkampanye yang bertujuan memenangkan pemilu dan menjadi pejabat selanjutnya, mereka lebih terkesan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan/jabatan yang mereka minati. Untuk mencapai jabatan tersebut, berbagai cara mereka lakukan. Mulai dari tujuan mereka yang akan menyejahterakan rakyat jika terpilih menjadi pemimpin hingga menyuap beberapa pihak ataupun tokoh yang berpengaruh pada masyarakat.

Sedangkan dalam kasus penyuapan pengaturan proyek-proyek dari dinas PUPR di Kabupaten Indramayu, beberapa pihak telah diduga sebagai penerima suap dari rekanan penggarap proyek tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerima suap tersebut tidak menjalankan tugasnya yang seharusnya dan lebih terkesan memetingkan kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini telah terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemberi suap tersebut.

Dalam demokrasi tanggung jawab, tidak ditekankan *siapa*-nya yang memimpin melainkan *keterlibatan*-nya dalam mewujudkan dan menjaga demokrasi secara tanggung jawab. Demokrasi sangat meminta keterlibatan, bukan “ikut-ikutan”, yang ditumpukan pada moral tanggung jawab.

Dasar untuk demokrasi pancasila ala Soekarno adalah “semua buat semua”. Tetapi dengan adanya kasus penyuapan ini menunjukkan bahwa mereka bersikap egois, mementingkan kepentingan individu serta kelompok mereka saja.

KAITAN PENYUAPAN DENGAN GOTONG-ROYONG

Soekarno mengatakan bahwa prinsip negara ini adalah gotong-royong, ia mau mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok apa pun yang hendak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan bersama.

Lebih dari itu, Soekarno hendak mengatakan bahwa Indonesia didirikan untuk menjamin kepentingan semua warga Indonesia, apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan keadaan ekonominya. Dalam retorika, ia mengecam “individualisme” yang lahir dari liberalisme barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan oleh pertarungan antar partai.

Konsep natura negara gotong-royong juga diasalkan pada “natura” manusia Indonesia yang mengedepankan semangat kerja sama dan bahu-membahu. Dari sini sebenarnya juga

tampak bahwa setidaknya dalam penggalian Soekarno tidak ada sifat merusak dan koruptif dalam natura manusia Indonesia. Negara yang kuat dengan demikian akan tercipta bila semua warga Indonesia menghayati kegotongroyongan dan mengimplementasikannya dalam hidup sehari-hari.

Dalam kasus penyuapan ini, para pelaku suap-menyuap tidak bergotong-royong untuk kepentingan proyek-proyek yang dibangunnya, tetapi bergotong-royong untuk mendapatkan uang dari hasil korupsi rekanan penggarap proyek tersebut. Hal ini mencoreng gotong-royong (ekasila) Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, Agustinus W.. 2017. *Alangkah Hebatnya Negara Gotong-royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: Kanisius.

Dewantara, Agustinus W.. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius.